



Judul : Implementasi dibagi tiga kategori
Tanggal : Senin, 09 Mei 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Implementasi Dibagi Tiga Kategori

Implementasi Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran baru 2022/2023 diperluas secara mandiri di luar sekolah penggerak pusat keunggulan. Implementasi sesuai kesiapan sekolah yang dibagi dalam tiga kategori.

JAKARTA, KOMPAS — Implementasi Kurikulum Merdeka yang mulai dilaksanakan masif secara mandiri di jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran baru 2022/2023 disesuaikan dengan kesiapan sekolah. Pemerintah mulai menetapkan sekolah/madrasah yang akan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam tiga kategori.

Berdasarkan data dari laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id yang diakses pada Minggu (8/5/2022), terdapat sebanyak 143.265 satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama yang mendaftar untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri. Pada tahap I sudah diterbitkan surat keputusan bagi satuan pendidikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yakni kategori mandiri belajar sebanyak 35.334 satuan pendidikan, kategori mandiri berubah 59.429 satuan pendidikan, dan kategori mandiri berbagi 3.607 satuan pendidikan. Sisanya juga akan mendapatkan surat keputusan.

Di webinar Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi bertajuk "Kupas Tuntas Implementasi Kurikulum Merdeka", Minggu (8/5), anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, mengingatkan pemerintah agar Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan tergesa-gesa di banyak sekolah, tetapi perlu dimatangkan dulu. "Persiapan implementasi ini harus jelas betul dari pelatihan guru, aturan bukmunya, hingga anggaran," ujarnya.

Praktisi pendidikan dan pendamping guru Aulia Wijasih mengatakan, perubahan untuk perbaikan mutu, termasuk lewat implementasi Kurikulum Merdeka, tentu saja harus didukung. Namun, belajar dari pengalaman perubahan kurikulum selama ini, sebenarnya hal-hal penting seperti sekolah seharusnya bisa membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kontekstual, pembelajaran aktif hingga berbasis proyek, ataupun pembelajaran berpusat pada siswa sebenarnya sudah ada.

"Namun, tetap belum dipahami secara optimal. Karena

itulah, keberhasilan ini bukan ditentukan dari gonta-ganti kurikulum karena semangatnya sama, tapi bagaimana perubahan ini bisa membuat visi sekolah dan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, hingga pemerintah daerah itu benar-benar seperti yang diharapkan. Ini yang belum juga terjadi," tutur Aulia.

Sementara itu, M Fatkoer Rohman, salah satu kepala SMA yang sekolahnya terpilih sebagai program sekolah penggerak angkatan kedua tahun ajaran 2022/2023, mengatakan, kurikulum bukan sebatas materi/mata pelajaran. Pemahaman ini yang harus ditekankan pada guru/sekolah agar implementasi Kurikulum Merdeka berdampak. Tidak seperti pergantian kurikulum selama ini, guru tetap saja mengajar dengan cara yang sama, seperti ceramah dan pembelajaran yang tak berpusat pada siswa.

"Kalau ditelusuri, sebenarnya tidak jauh berbeda Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013. Memang ada istilah-istilah baru yang kalau dipahami sebenarnya merangkum dari yang ada. Tantangannya ini ketika guru-guru mengembangkan sendiri tujuan pembelajaran, di sini letak kelemahan banyak guru. Memang guru diberi kemerdekaan, tapi apakah guru siap menangkap hal ini?" kata Fatkoer.

Menurut dia, untuk sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan program sekolah penggerak akan mendapatkan dukungan anggaran. Kesiapan sekolah dimulai dengan pembentukan Komite Pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, guru bimbingan konseling, dan empat guru lain. Tim sekolah ini akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Said Hamid Hasan mengatakan, jika pengembangan kurikulum masih dalam tahap prototipe, berarti kurikulum masih cair. Artinya, masih dalam proses uji coba sehingga belum bisa digunakan secara umum.

"Ada moral dan etika dalam pengembangan kurikulum yang juga harus diikuti, bukan hanya hal teknis. Pertanggungjawaban dari pemberlakuan tiga kuriku-

lum, yakni Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka, ini harus jelas. Hal ini jadi persoalan besar dalam pengembangan kurikulum ketika pilihan itu tidak sama," tutur Hamid.

Secara mandiri

Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri, di luar 2.500 sekolah penggerak/pusat unggulan, dimulai pada tahun ajaran 2022/2023. Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri dimulai dari usia 5-6 tahun pada jenjang pendidikan anak usia dini serta kelas I dan kelas IV SD, Lalu, kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK sederajat.

Terkait implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri, kategori mandiri belajar berarti satuan pendidikan menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan Kurikulum 2013 atau Kurikulum 2013 yang disediakan. Mandiri berubah berarti menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Lalu, mandiri berbagi menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.

Kemendikbudristek juga mulai menyosialisasikan ketersediaan buku-buku Kurikulum Merdeka. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Jumeri lewat surat edarannya menyebutkan, pengadaan buku-buku teks Kurikulum Merdeka di sekolah pelaksana dilakukan melalui mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dengan memesan pada penyedia yang sudah ditetapkan. Proses pemesanan untuk sekolah hingga April, sedangkan yang bukan pelaksana program sekolah penggerak hingga Mei.

Adapun pembiayaan untuk pengadaan buku-buku teks Kurikulum Merdeka di sekolah penggerak dari bantuan operasional sekolah (BOS) kinerja 2022, bantuan operasional pendidikan (BOP) kinerja 2022, bantuan pemerintah, ataupun dana mandiri. Sekolah yang bukan pelaksana program sekolah penggerak juga sama, hanya saja untuk BOS/BOP dari

reguler.

Hasil evaluasi

Secara terpisah, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan, buku-buku teks Kurikulum Merdeka telah melalui proses penelaahan dan revisi sebelum digunakan di satuan pendidikan. Evaluasi terhadap buku-buku itu terus dilakukan, termasuk melalui pengumpulan umpan balik dari guru yang telah menggunakannya.

"Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk terus memperbaiki buku-buku teks tersebut. Hak cipta dari buku-buku teks yang disusun oleh Kemendikbudristek merupakan milik Kemendikbudristek," ujar Anindito.

Ia menegaskan, perubahan paradigma kurikulum merupakan salah satu kebijakan Kemendikbudristek yang bersama-sama dirancang demi cita-cita Merdeka Belajar untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada dua dimensi dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, yaitu dimensi kualitas dan keadilan.

"Pada dimensi kualitas, kita ingin memastikan agar semua anak, semua peserta didik, mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya. Inilah definisi pendidikan yang berkualitas," tutur Anindito.

Untuk dimensi keadilan, lanjutnya, Kemendikbudristek ingin memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas dapat diberikan secara adil kepada semua anak, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau di mana mereka tinggal. Karena itu, kebijakan Merdeka Belajar mempunyai nuansa atau sifat asimetris.

"Kita ingin memberi target, intervensi, dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi, program-program yang kita rancang itu tidak dimaksudkan untuk menyera-gamkan intervensinya, tapi justru untuk memberi ruang bagi intervensi yang kontekstual," ucap Anindito. (ELN)